PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2020 | Hal.: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Batalkan Rencana Pembentukan Pansus Jiwasraya

Indef Sarankan DPR

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI mewacanakan pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mengungkap kasus gagal bayar pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyarankan, rencana tersebut sebaiknya dibatalkan.

Dia berpendapat, keberadaan pansus malah dapat menghambat rencana penyelesaian pemerintah melalui pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra untuk menggaet investor. Keberadaan pansus juga berpotensi mengganggu penegakan hukum melaui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung. "Yang paling dikhawatirkan dari pembentukan pansus ini yaitu menghambat proses hukum, serta proses pemulihan secara bisnis. Mestinya proses hukum dan aksi korporasi jalan tapi malah terganggu," ujarnya dalam keterangannya, Senin (13/1).

Saat ini BPK dan Kejaksaan Agung sedang melakukan investigasi kasus Jiwasraya. Seharusnya, kata dia, langkah tersebut harus dihargai oleh kalangan dewan. Sehingga, kedua lembaga tersebut bisa fokus untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya dengan cepat. Di samping itu, lanjutnya, pengawasan juga sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Tapi, kalau DPR RI membentuk pansus, justru nanti dewan ikut sibuk dalam persoalan Jiwasraya. DPR akan memanggil pihak-pihak yang terlibat, nah ini kan bisa menghambat BPK maupun Kejaksaan," katanya.

Abra menambahkan, pemanggilan kepada pihak-pihak tersebut sangat mungkin untuk dipolitisasi oleh kalangan partai politik. Sehingga, penyelesaian Jiwasraya yang sedang berjalan justru akan simpang siur dan berdampak negatif terhadap kalangan investor. "Kalau nanti politisasi kasus Jiwasraya muncul di media, hal tersebut dilihat oleh investor akan buruk keadaannya. Investor akan melihat keadaan yang tidak baik dan menilai bahwa iklim investasi sedang tidak baik," imbuhnya.

Abra menambahkan, pembentukan pansus sejatinya hanya dapat dilakukan jika memang pemerintah mengambil keputusan bahwa penyelesaian persoalan Jiwasraya mesti dilakukan melalui skenario bail out. Yakni, perusahaan membutuhkan suntikan modal dari APBN untuk membayar tagihan para nasabah Jiwasraya. Namun, ini pun juga berpotensi jadi bancakan karena akan ada negosiasi-negosiasi yang pada akhirnya merugikan negara jauh lebih besar lagi. ***(romysbinekasri/jp)***